KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menkeu Yakinkan Fiskal Terjaga: Kementerian Mulai Potong Anggaran
Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Menkeu Yakinkan Fiskal Terjaga

Kementerian Mulai Potong Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bahwa pihaknya akan menjaga stimulus fiskal di tengah tekanan atas pendapatan negara. Mitigasi dilakukan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Orientasinya adalah prioritas pembangunan sesuai rencana.

Prioritas yang dimaksud adalah pengentasan rakyat dari kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan usaha menarik investasi menjadi agenda utama. Hal tak kalah penting adalah terus menjalankan program jaring pengaman sosial, kesehatan, dan pendidikan.

"Saya yakin bisa (menjaga stimulus ekonomi) karena tak memotong anggaran infrastruktur. Hal-hal yang sudah dikontrakkan tidak akan diganggu," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara penutupan Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) Ke-12 di Jakarta, Kamis (4/8).

Target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 adalah Rp 1.786,2 triliun, sementara pagu belanja Rp 2.082,9 triliun. Dengan demikian, defisitnya senilai Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto.

Realisasi sampai dengan semester I-2016 menunjukkan bahwa APBN-P 2016 tertekan. Hal ini berawal dari realisasi pendapatan negara yang jauh dari target. Jika berjalan linier, kondisi ini akan menyebabkan defisit melebar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara pada semester I-2016 adalah Rp 643,7 triliun atau 35,5 persen dari target. Angka ini lebih rendah ketimbang realisasi pendapatan negara pada semester I-2015, yakni Rp 697,4 triliun atau 39,6 persen dari target.

Sementara realisasi anggaran belanja negara adalah Rp 865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu. Dengan demikian, realisasi defisitnya mencapai Rp 230,7 triliun atau 77,7 persen dari target.

Presiden Joko Widodo, menurut Sri Mulyani, sudah melihat banyak anggaran belanja yang masih bisa dihemat, misalnya biaya perjalanan dinas dan dana operasional yang tidak prioritas. Dengan demikian, penghematan tidak sampai memotong program prioritas pemerintah.

"Dengan penyesuaian ini, defisit (APBN) kami harapkan tidak akan meningkat. Kami masih melihat bisa dijaga di koridor defisit," kata Sri Mulyani.

Skenario penyesuaian

Penyesuaian yang dimaksud Sri Mulyani adalah penyesuaian APBN-P 2016. Tidak akan ada revisi formal terhadap asumsi makro. Namun, Kementerian Keuangan akan membuat skenario penyesuaian di sisi pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan sehingga anggaran menjadi lebih realistis.

Sementara defisit APBN-P 2016, Sri Mulyani menambahkan, masih akan terus dimitigasi. Namun, perhitungan sementara menyebutkan ada tambahan senilai Rp 17 triliun.

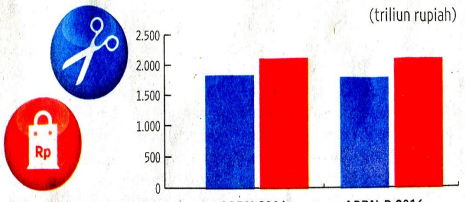
"Mungkin (defisitnya) tidak akan banyak berubah. Nanti akan kita lihat. Saat ini pembiayaan di kisaran yang direncanakan," kata Sri Mulyani.

Ia pun melanjutkan, "Jadi, pada akhirnya, prioritasnya adalah benar-benar merestorasi kepercayaan (pasar) dan memanfaatkan momentum yang ada."

Gubernur Bank Indonesia (BI)

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Postur APBN dan APBN-P 2016



Pos Anggaran	APBN 2016	APBN-P 2016
A. Pendapatan Negara	1.822,54	1.786,23
B. Belanja Negara	2.095,72	2.082,95
C. Keseimbangan Primer*	-88,24	-105,51
D. Defisit Anggaran	-273,18	-296,72

*Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara yang tidak termasuk pembayaran bunga.

Pemangkasan APBN 2016 Tahap I

Dasar hukum
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 (dikeluarkan 12 Mei 2016)

Besaran Pemotongan APBN 2016

No	Target	Nilai (triliun rupiah)
1.	Efisiensi belanja operasional	20,95
2.	Efisiensi belanja lainnya	29,06
	Total penghematan	**50,02**

Sasaran Utama Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga:

- Belanja perjalanan dinas dan paket rapat
- Langganan daya dan jasa
- Honorarium tim/kegiatan
- Biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya
- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Sisa dana lelang atau swakelola
- Anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak
- Kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya

Pemangkasan APBN 2016 Tahap II

Besar pemangkasan: **Rp 133,8 triliun**

Sasaran:
- Anggaran belanja kementerian/lembaga **Rp 65 triliun**.
- Anggaran transfer daerah **Rp 68,8 triliun**.

Penyebab:
- Penerimaan negara dari pajak tak sesuai target.
- Harga komoditas ekspor Tanah Air, beberapa waktu terakhir mengalami tekanan.

Sumber: Litbang "Kompas"/DEW, SGH; diolah dari Nota Keuangan APBN Perubahan 2011-2016, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan pemberitaan "Kompas"

INFOGRAFIK: GUNAWAN

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Menkeu Yakinkan Fiskal Terjaga

(Sambungan dari halaman 1)

Agus DW Martowardojo, di Jakarta, menilai positif rencana pemerintah merevisi anggaran belanja negara dari APBN-P 2016. "Itu menunjukkan bahwa kita berhati-hati dan ingin menjaga kredibilitas APBN," katanya.

Menurut Agus, sebelum dilakukan pemotongan anggaran, BI meyakini pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen sampai 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan II diperkirakan 4,94 persen dan triwulan III sebesar 5,2 persen. Sepanjang 2016, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,09 persen.

Pemotongan

Beberapa kementerian juga mulai melakukan pemotongan anggaran. Meski demikian, jumlah pastinya belum jelas. Rencana total pemotongan mencapai Rp 133,8 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali memotong anggaran belanja Rp 2 triliun. Dengan pemotongan jilid ketiga itu, total pemangkasan APBN di Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 5,5 triliun atau 42 persen dari pagu awal sebesar Rp 13,9 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, pemotongan anggaran itu bersumber dari pos belanja yang tidak produktif, antara lain seminar, perjalanan dinas, dan biaya harmonisasi.

Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga dinilai wajar karena sumber anggaran dari pajak tidak mencukupi untuk memikul anggaran belanja. Ia meyakini bahwa penghematan anggaran akan membuat perekonomian lebih sehat.

Kepala Biro Komunikasi, Pelayanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko membenarkan bahwa anggaran Kementerian ESDM kembali dipangkas, tetapi belum diketahui persis berapa nilainya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan pemotongan anggaran untuk Kementerian PUPR meski jumlahnya belum dipastikan. "Tentu kita akan memotong pengeluaran yang bersifat administratif meskipun itu jumlahnya saya kira tidak terlalu besar," katanya.

Pengampunan pajak

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, di Vientiane, Laos, mengatakan, BKPM akan turut menyukseskan program pengampunan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka sarana izin investasi tiga jam kepada peserta pengampunan pajak.

Hingga Kamis, pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pintu masuk dana repatriasi, yaitu bank, manajer investasi, dan sekuritas, belum menerima surat keputusan atas penunjukan tersebut. Manajer investasi pun belum menawarkan produk investasi untuk nasabah, tetapi masih fokus pada sosialisasi.

"Belum ada surat keputusan dan peraturan Menteri Keuangan," kata Direktur Utama Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi.

Dia mengatakan, kemungkinan penawaran produk untuk dana repatriasi akan tertunda. Namun, sembari menunggu kelengkapan peraturan, manajer investasi terus menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.

Di Jakarta, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto pun mengungkapkan, walaupun belum ada peraturan tambahan, tidak berarti manajer investasi tidak dapat berbuat apa-apa.

(LAS/JOE/CAS/LKT/C11/APO/HEN/FER/NAD)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com